



Media Title	Investor Daily		
Head Line	Pemerintah Imbau Gandeng BUJT Lain		
Date	30 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	Eko Adityo Nugroho	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

DEFAULT TOL SOLO-NGAWI

Pemerintah Imbau Gandeng BUJT Lain

Oleh Eko Adityo Nugroho

► JAKARTA – Pemerintah mengimbau agar PT Solo Ngawi Jaya, pemegang konsesi jalan tol Solo-Ngawi, bekerja sama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) lainnya apabila mengalami kendala pendanaan. Kerja sama itu juga untuk menghindari terjadinya penghentian pengusahaan jalan tol sepanjang 90,10 kilometer tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pemegang konsesi jalan tol tersebut sudah dinyatakan cedera janji (*default*), menyusul tidak ada progres pembangunan proyek tersebut. "Jadi kalau di-*default*, artinya cedera janji. Kemudian diberi kesempatan satu bulan untuk memperbaiki," ujar dia di Jakarta, akhir-pekan lalu.

Dia berharap masalah yang dihadapi PT Solo Ngawi Jaya dapat segera diatasi. Misalnya melalui peninjauan bisnis dengan BUJT lainnya. Djoko mencontohkan, PT Jasa Marga dapat menjajaki pembelian kepemilikan saham dengan PT Solo Ngawi Jaya. Namun, badan usaha milik negara (BUMN) di bidang jalan tol itu bisa jadi tidak mau jika komposisi sahamnya hanya sedikit. "Yang seperti itu, biarkan saja menjadi urusan keduanya. Yang penting perusahaannya dapat pendanaan yang kuat," tandas dia.

Menurut Djoko, skema tersebut lebih efisien dibandingkan pemerintah harus menender ulang jalan tol senilai Rp 9,8 triliun tersebut.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fachur Rochman mengungkapkan, setiap

BUJT bisa saja melakukan peninjauan bisnis terhadap proyek jalan tol yang baru dan sedang dibangun ataupun yang sudah terbangun dan beroperasi. "Ini langkah biasa dalam bisnis, dan tidak harus BUJT-nya itu sedang kesulitan atau tidak," tutur dia kepada *Investor Daily* di Jakarta, Minggu (29/12).

Dia mencontohkan, proyek jalan tol di atas laut, Bali Mandara, yang saat ini ada kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung. Kedua pemerintah daerah itu bisa masuk di saat jalan tol tersebut beroperasi.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali sebelumnya mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan PT Solo Ngawi Jaya telah cedera janji pengusahaan jalan tol Solo-Ngawi lantaran tidak ada progres pembangunan. Padahal, pемancangan tiang perdana (*ground-breaking*) proyek tersebut sudah resmi dilakukan September lalu.

BPJT memberi waktu sebulan untuk meminta klarifikasi dari yang bersangkutan. Setelah mendapatkan jawaban, BPJT akan mengonfirmasi kendala yang dihadapi pemegang konsesi jalan tol tersebut. "Kalau ada

kendala tanah, berarti dari sisi pemerintah akan dilihat. Sedangkan jika ada kendala dari segi pembiayaan, kami juga akan minta konfirmasi dari perbankan," papar dia.

Seharusnya, ujar Gani, tidak ada masalah secara teknis karena proses pembebasan lahan di jalan bebas hambatan tersebut sudah mencapai 84%. Namun begitu, bisa saja itu ditengarai menjadi penyebab sindikasi perbankan belum mengucurkan kreditnya, sehingga BUJT kesulitan mendapatkan pendanaan.

"Apalagi, pemegang konsesi memang juga belum menandatangani kredit pembiayaan dari sindikasi perbankan yang dipimpin Bank Mandiri. Padahal hal tersebut tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT)," ujar Gani.

Sementara itu, Koordinator Komunikasi PT Thiess Indonesia, pemegang saham PT Solo Ngawi Jaya, Mapalara Simatupang mengungkapkan, pihaknya tetap akan memenuhi pengusahaan jalan tol tersebut. Apalagi, saat ini perusahaan masih mengerjakan pembangunan proyek jalan tol Solo-Ngawi. "Sejauh ini, pengerjaan masih berjalan dengan melibatkan subkontraktor dan mengerahkan 100 pekerja. Kami juga tengah membangun kantor perwakilan di sekitar lokasi jalan tol," tutur dia.

Jalan tol Solo-Ngawi merupakan pengusahaan jalan tol dengan skema kerjasama pemerintah-swasta untuk meningkatkan kelayakan finansial. Dukungan pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk pengadaan tanah dan konstruksi sepanjang 20,90 km. Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan dana APBN dari TA.2009 sampai dengan TA.2014 sebesar Rp 1,7 triliun untuk pengadaan lahan dan Rp 1,5 triliun untuk konstruksi sepanjang 20,90 km.